

IMPLEMENTASI PROGRAM KESERASIAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA PALU

Susanti

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan, Palu

ABSTRAK

Studi ini tentang Implementasi Kebijakan Program Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat di Kota Palu, yang dikaji berdasarkan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan pendekatan penelitian kualitatif yang melibatkan informan terpilih 7 orang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada standar dan sasaran kebijakan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu masih kurang, dan sumber dana pada anggaran terbatas. Karakteristik organisasi Dinas Tenaga Kerja dan forum KSBM Kelurahan masih terkendala dengan dukungan masyarakat. Sikap para pelaksana terkendala dengan partisipasi masyarakat yang rendah. Komunikasi dalam kegiatan sosialisasi keserasian sosial berbasis masyarakat sudah dilaksanakan, namun masih belum optimal karena semua masyarakat belum mengetahui kegiatan pelaksanaan program ini. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, mempengaruhi pelaksanaan kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat. Hal ini karena kurangnya semangat kegotong-royongan masyarakat yang senantiasa mengharapkan adanya upah kerja dalam kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Masyarakat, Program Keserasian Sosial.

PENDAHULUAN

Program keserasian sosial berbasis masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, persaudaraan sejati, senasib-sepenanggungan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat. Keserasian sosial merupakan bentuk implementasi dari pemikiran, bahwa nilai-nilai luhur atau nilai-nilai kebersamaan akan berkembang kembali, jika ada upaya untuk membaurkan masyarakat secara sosial budaya yang berbeda dalam suatu kebersamaan yang direncanakan.

Sasaran program keserasian sosial berbasis masyarakat adalah daerah yang memiliki kerawanan atau potensi terjadinya konflik sosial. Diharapkan dengan dilaksanakannya program keserasian sosial berbasis masyarakat di daerah yang memiliki potensi konflik sosial dapat mengatasi konflik sosial serta mampu menumbuhkan sifat kearifan lokal, seperti kegotong-royongan yang merupakan budaya Bangsa Indonesia. Temuan studi Alamsyah, M. Nur dan Rusmawaty (2018) yang mengemukakan bahwa pelibatan para pemangku adat lokal yang bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah kelurahan untuk penanganan berbagai keadaan keamanan dan ketertiban di masyarakat Layana dapat menciptakan sinergi dan kondisi yang terkendali. Ini menjelaskan bahwa pentingnya pemanfaatan dimensi budaya lokal dalam mengefektifkan sebuah kebijakan. Bertanggung jawab melalui penegakkan sistem dan prosedur-prosedur, maka akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah. Hal ini semakin terlihat bahwa retribusi parkir mendukung dan memiliki peran sangat baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palu. Jumlah penerimaan PAD Kota Palu pada Tahun 2016 sebesar Rp 1.392.143.740.198,16. sedangkan penerimaan retribusi parkir untuk tahun 2016 sebesar Rp. 2.149.905.000 dari target Rp. 2.949.037.500 atau hanya 72,90%. Dari jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu dari sektor perparkiran hanya memberikan kontribusi sebesar 0,2 %. (sumber Dinas Perhubungan Kota Palu).

Fokus penelitian ini terkait implementasi program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu. Studi ini fokus pada masalah sosial, sehingga

peneliti memilih menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn, yaitu: 1). Standar dan sasaran kebijakan, 2). Sumber Daya 3). Karakteristik organisasi pelaksana, 4). Sikap para pelaksana, 5). Komunikasi antar organisasi terkait, 6). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dengan pertimbangan bahwa:

- 1) Kebijakan yang menjadi fokus penelitian merupakan suatu kebijakan yang dalam implementasinya sangat memerlukan pemahaman yang baik dan benar, serta komitmen yang tinggi terhadap konten (isi) dan konteks kebijakan dari para implementor, sedangkan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn lebih menekankan proses dalam mengimplementasikan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif.
- 2) Van Metter dan Van Horn lebih menekankan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan, dan kepatuhan implementor tingkat bawah terhadap perintah atasan.
- 3) Van Metter dan Van Horn menekankan keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (politik, ekonomi dan sosial budaya).

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu, khususnya di Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami implementasi program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu, khususnya di Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu.

LANDASAN TEORITIS

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Metter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai aspek. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Metter dan Horn (dalam Mirandati, 2007:31-32) ada enam faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik; (6) disposisi implementor. Implementasi kebijakan memiliki berbagai model, model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dengan Carl Van Horn (dalam Sugiana, 2012:18-19). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa faktor yang dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan publik adalah faktor berikut:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik agen pelaksana/ implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- d. Kecenderungan (disposition) palaksana/Implementor.

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Yang dimaksud agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kemudian pada faktor kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Selanjutnya yang dimaksud disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni:

- a. Tanggapan, implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Widodo, 2009:105) terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan; arah respons mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection); intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena bagaimanapun juga, implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang crucial. Implementor bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan. Sebaliknya penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementor) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Tulisan ini hendak melihat implementasi Program Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat di Kota Palu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan 2 (dua) sumber data, yaitu primer berasal dari hasil wawancara dengan informan dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian dengan jenis pertanyaan yang mengarah pada 6 (enam) aspek model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dan data sekunder dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu serta lembaga/instansi terkait terutama dokumen, peraturan perundang-undangan, dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu Kota Palu.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Gambaran umum implementasi program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu merupakan salah satu kegiatan yang dapat membantu meredam potensi bencana sosial dalam masyarakat, karena kegiatan ini memberikan kedudukan dan peran masyarakat yang besar sebagai perencana, pelaksana dan pengendali kegiatan secara mandiri, sehingga secara bertahap akan tumbuh semangat kebersamaan, persaudaraan sejati, senasib sepenanggungan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat.

Kegiatan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) merupakan suatu bentuk kegiatan kesejahteraan sosial, baik fisik maupun non-fisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling

menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usul serta lainnya.

Forum keserasian sosial berbasis masyarakat sebagai pelaksana, perencana, dan membuat laporan selama kegiatan berjalan sampai selesai, antara lain perbaikan jalan lingkungan, rehabilitasi rumah ibadah, gedung balai pertemuan, pembangunan MCK, rehab gedung sekolah, pembuatan drainase, tenda pesta, deker dan pembuatan tugu keserasian sosial dan sarana-sarana lain yang dibangun masyarakat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Palu nomor 460/607/SosNaker/2012 tentang Penetapan Pengurus Forum Warga dalam Penanganan Kegiatan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat di Kota Palu Tahun 2012 yang menetapkan Forum KSBM sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan program/kegiatan penguatan keserasian sosial berbasis masyarakat;
- b. Mengelola dana Keserasian Sosial Tahun 2012 sejumlah Rp.109.000.000,- (Seratus Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial RI;
- c. Melaksanakan program/kegiatan secara swakelola;
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fisik dan keuangan yang diterimanya kepada Pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
- e. Menetapkan pola metode serta mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan baik pembuatan proposal maupun pembuatan laporan pertanggung jawaban dalam rangka penguatan keserasian sosial berbasis masyarakat tahun 2012 sekaligus memonitor dan mengevaluasi;
- f. Sebagai pembuat rancangan program atas dasar prakarsa, dari dan oleh warga masyarakat;
- g. Membantu pendamping untuk melakukan kontrol terhadap berbagai sumber dukungan pembangunan kesejahteraan sosial;

Pelaksanaan program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu diprioritaskan pada daerah-daerah rawan konflik sosial, implementasi program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu tahun 2012 di antaranya Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu sudah terlaksana, namun pelaksanaan tersebut perlu dukungan semua masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan KSBM di Kota Palu masih perlu ada keterlibatan semua pihak untuk terus mendukung program keserasian sosial berbasis masyarakat sebagaimana yang telah dilaksanakan di Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu, di antaranya di Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu sudah terlaksana cukup baik, tetapi belum mencapai hasil yang optimal. Untuk membahas lebih lanjut hasil penelitian tentang implementasi kebijakan ini yang dikaji menurut model Van Metter dan Van Horn dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Aspek standar dan sasaran kebijakan.

Tujuan dan sasaran program KSBM pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat sebelum konflik, pra konflik, dan pasca terjadinya konflik sosial, sehingga terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang serasi dan harmonis. Menurut pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Hasil penelitian di lapangan, ditemukan fakta bahwa standar dan sasaran kebijakan KSBM belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya partisipasi sebagian besar masyarakat, dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan, maka perlu menjadi acuan bahwa standar dan sasarannya harus berdasarkan tujuan penerimaan semua masyarakat yang akan dilaksanakan.

Dari penjelasan di atas, baik yang bersumber dari wawancara maupun hasil observasi dan studi dokumentasi, terbukti bahwa masyarakat telah memahami standar, tujuan dan sasaran kebijakan program KSBM, namun kondisi pelaksanaan kegiatan KSBM belum optimal, hal ini merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program KSBM. Peneliti berpendapat bahwa kejelasan dan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran suatu kebijakan akan mempengaruhi lingkungan kinerja implementasi kebijakan, tanpa adanya kejelasan dan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan maka kinerja implementasi kebijakan tidak akan tercapai secara maksimal.

2) Aspek sumber daya

(1) Sumber daya manusia

Pelaksanaan program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu ditinjau dari aspek sumber daya manusia masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat, dukungan partisipasinya masyarakat sangat menunjang berhasilnya kebersamaan dalam wujud kerjasama. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk memanfaatkan berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

Hasil penelitian dilapangan, ditemukan fakta bahwa sumber daya manusia dapat berjalan lancar apabila ada dukungan semua masyarakat, terlihat dukungan kerjasama dimasyarakat sangat kurang memberi dukungan, hal ini dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan KSBM karena diperuntukkan bagi semua masyarakat guna menciptakan suasana gotong royong, kebersamaan dan persatuan untuk menjaga kerukunan antar sesama masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara maupun hasil observasi serta penelusuran dokumentasi, dapat disimpulkan, bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan program keserasian sosial berbasis masyarakat mengalami hambatan yaitu melihat latar belakang tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih dibawah dan pemahaman terhadap program ini masih minim dari apa yang diinginkan.

(2) Aspek Dana

Aspek dana kegiatan program keserasian sosial berbasis masyarakat merupakan salah satu pendukung kelancaran kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non fisik berupa aksi bersama kerja bakti bersama-sama dengan masyarakat dengan aturan KSBM tidak ada pemberian upah kerja kepada masyarakat yang berada di kelurahan-kelurahan.

Hasil penelitian di lapangan bahwa aspek dana diharapkan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan KSBM, terlihat dilapangan kondisi finansial dana yang mengetahui forum KSBM dan kondisi finansial dana yang ada tidak mencukupi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan KSBM. Pembangunan gedung balai pertemuan, rehab mesjid dan tugu keserasian sosial hal ini juga yang perlu diperhatikan menjadi dasar bahwa sumber dana yang terbatas akan menentukan implementasi program KSBM berjalan efektif atau tidak.

Dari hasil penelitian yang bersumber dari wawancara maupun hasil observasi serta dokumentasi, bahwa program keserasian sosial berbasis masyarakat di kota Palu diantaranya di kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu dari kondisi finansial telah disediakan oleh pemerintah dan kondisi finansial dananya yang terbatas ini diharapkan dapat menunjang kelancaran kegiatan program.

Peneliti berpendapat bahwa aspek dana sebagai bagian dari sumber daya menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan agar sebuah organisasi atau forum mampu berfungsi secara maksimal. Selain itu kondisi finansial dana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin mempunyai bawahan yang mencukupi yang mempunyai

kompeten, tetapi tanpa adanya aspek dana pendukung (aspek dana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Aspek karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian dilapangan, fakta lapangan menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana dapat terkontrol dengan baik apabila mengikutsertakan sebagian besar masyarakat, terlihat dilapangan kinerja forum KSBM cukup baik dengan melaksanakan pembangunan gedung balai pertemuan, rehab mesjid dan tugu keserasian sosial, namun kegiatan non fisik kerjasama gotong royong bersama-sama semua masyarakat pada dasarnya harus dapat diterima oleh semua masyarakat karena sifatnya program KSBM ini untuk membangun kerjasama saling membantu antar sesama dan membangun kebersamaan untuk saling hidup berdampingan damai dan tentram.

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara maupun hasil observasi serta penelusuran dokumentasi, dapat disimpulkan, bahwa aspek karakteristik organisasi dengan aturan kinerja program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu memberikan pemahaman yang sifatnya demokratis berdasarkan aturan-aturan yang ada sesuai dengan prosedur tentang pelaksanaan program keserasian sosial berbasis masyarakat ke wilayah daerah-daerah rawan permasalahan sosial sebelum terjadinya konflik sosial diantaranya Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu, lebih lanjut forum KSBM yang berada di wilayah kelurahan sebagai pelaksana kegiatan berperan sebagai perencana dan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan aturan yang diberikan, hal inilah yang menjadi acuan masyarakat bahwa bantuan dana keserasian sosial berbasis masyarakat diharapkan kebutuhan pembangunan yang kedepannya dapat dipergunakan semua masyarakat dapat menciptakan kerja gotong royong.

Peneliti berpendapat bahwa aspek karakteristik organisasi dengan aturan kinerja pelaksana kegiatan program keserasian sosial berbasis masyarakat saling berkoordinasi antar instansi terkait dan terlebih kepada forum KSBM yang berada di Kelurahan sebagai pelaksana kegiatan dengan dibekali pemahaman dan arahan serta petunjuk teknis lapangan, namun kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik apabila melibatkan semua masyarakat sehingga dapat diketahui dan didukung dengan baik.

4) Aspek sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Hasil penelitian dilapangan, fakta lapangan menunjukkan bahwasikap para pelaksana forum KSBM kelurahan Duyu cukup baik dalam kegiatan KSBM melalui pembangunan gedung balai pertemuan, rehab mesjid dan tugu keserasian sosial namun terlihat dilapangan kegiatan non fisik berupa kerja gotong royong melaksanakan program KSBM terkendala dalam melibatkan dukungan semua masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara maupun hasil observasi serta penelusuran dokumentasi, dapat disimpulkan, bahwa aspek sikap para pelaksana melalui

program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu melihat peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu dengan forum KSBM di kelurahan sebagai pelaksana kegiatan dapat terlaksana dengan baik bilamana ada dukungan dari semua pihak masyarakat, mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun kebersamaan semua masyarakat.

Peneliti berpendapat bahwa aspek sikap para pelaksana dalam pelaksanaan program keserasian sosial berbasis masyarakat diperlukan adanya sikap yang konsisten para pelaksana untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan-tujuan dasarnya. Sehingga tidak berhadapan dengan masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan program. Tidak hanya karena tujuan yang menggambarkan keberpihakan terhadap mereka.

5) Aspek komunikasi antar organisasi terkait

Pelaksanaan program keserasian sosial berbasis masyarakat di kota Palu dari aspek komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang membahas pembangunan sarana fisik dan non fisik agar informasi yang diberikan dapat dipahami, selain itu perlu juga melakukan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Hasil penelitian dilapangan bahwa komunikasi antar organisasi terkait dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar turut mendapat dukungan dari program KSBM. terlihat dilapangan program KSBM sebagian besar masyarakat kurang mengetahui sehingga dalam wujud sosialisasi perlu selalu di infomasikan kepada semua masyarakat agar kegiatan KSBM ini mendapat respon positif kepada semua masyarakat terutama apa yang menjadi kebutuhan sarana bersama masyarakat untuk dapat digunakan bersama-sama.

Fakta lapangan menunjukan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu belum maksimal, karena sosialisasi hanya melibatkan kelompok tertentu seperti aparatur kecamatan dan kelurahan serta tokoh masyarakat, sementara pesan sosialisasi kepada masyarakat secara umum tidak sampai karena terputus pada penerima informasi yang hadir pada sosialisasi.

Dari penjelasan diatas, baik yang bersumber dari wawancara maupun hasil observasi dan studi dokumentasi, bahwa aspek komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan melalui program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu melihat proses komunikasi yang berlangsung dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasisudah dilaksanakan namun informasi yang diterima masyarakat masih kurang, hal ini dapat dilihat dari kurangnya masyarakat dalam memahami pelaksanaan program keserasian sosial berbasis masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi, diperkuat dengan wawancara ketua forum KSBM diatas yang mengatakan cara pandang masyarakat masih mengharapkan ada dana upah kerja dalam pelaksanaan KSBM hal inilah yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana fisik dan kegiatan non fisik berupa kerja gotong royong yang berada dilingkungan masyarakat.

Peneliti berpendapat bahwa aspek komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan proses komunikasi yang berlangsung dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasisudah dilaksanakan namun informasi yang diterima masyarakat masih kurang dan masih perlunya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat, diharapkan terjalinnya kerjasama kepada pihak para pelaksana untuk saling memberikan informasi dari kegiatan tersebut.

6) Aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Aspek lingkungan politik tidak berpengaruh dalam implementasi program kebijakan keserasian sosial berbasis masyarakat. Sedangkan aspek sosial ekonomi ternyata menjadi faktor penghambat terhadap implementasi kebijakan program keserasian sosial berbasis masyarakat.

Hasil penelitian dilapangan, fakta lapangan menunjukkan bahwa dukungan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan KSBM kelurahan Duyu dipengaruhi lingkungan sosial ekonomi. terlihat dilapangan pelaksanaan kegiatan KSBM kelurahan Duyu berupa pembangunan fisik gedung balai pertemuan, rehab mesjid dan tugu keserasian sosial dan kegiatan non fisik berupa kerjasama gotong royong bersama masyarakat pelaksanaannya sebagian besar masyarakat kurang memberikan dukungannya dalam melaksanakan program KSBM, program KSBM tidak memberikan dana upah kerja kepada masyarakat, hal inidapat mempengaruhi pelaksanaan program KSBM.

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara maupun hasil observasi serta penelusuran dokumentasi, dapat disimpulkan, bahwa aspek lingkungan sosial ekonomi di Kota Palu berupa tingkat ekonomi atau pendapatan masyarakat yang masih rendah berpengaruh dalam implementasi program kebijakan keserasian sosial berbasis masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 15 disebutkan bahwa Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Penghasilan sebagian besar masyarakat yang rendah mengakibatkan sebagian besar masyarakat kurang bergotong-royong melaksanakan program KSBM dan sebagian besar masyarakat memilih untuk mencari pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan.

KESIMPULAN

Implementasi program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu di antaranya yang telah terlaksana di Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil pembahasan yang menggunakan 6 (enam) aspek, yaitu standar dan sasaran kebijakan kelompok sasaran atau sebagian besar masyarakat belum memahami program KSBM sehingga mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan; sumber daya berupa sumber daya manusia, sebagian besar masyarakat tingkat pendidikan dan ekonomi agak kurang, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program KSBM.

Selain itu, aspek dana yang terbatas dalam mendukung pelaksanaan program KSBM, karakteristik organisasi pelaksana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu, pemerintah kelurahan, forum KSBM di Kelurahan Pengawu dan Duyu telah terjalin hubungan koordinasi dalam pelaksanaan program KSBM; sikap para pelaksana kegiatan sudah memahami dan mendukung pelaksanaan program KSBM; komunikasi antar organisasi pelaksana atau para implementor sudah berjalan dengan baik, tetapi komunikasi dengan masyarakat masih kurang sehingga masyarakat kurang paham dan kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program KSBM; lingkungan sosial ekonomi sebagian besar masyarakat pendapatan ekonominya masih rendah sehingga mempengaruhi pelaksanaan program keserasian sosial berbasis masyarakat tidak ada upah kerja menyebabkan sebagian masyarakat kurang berpartisipasi untuk bergotong royong.

DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, Muhammad Nur dan Rusmawaty bte Rusdin, 2018. *Pelaksanaan Keamanan Dan Ketertiban Berbasis Budaya Di Kelurahan Layana Indah Kota Palu*, Jurnal ASPIRASI No. 2 Vol. 8 februari 2018 - ISSN : 2087-2208
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta, cetakan Ketiga.
- Mirandati, Devita Ayu. 2007. *Studi Implementasi Kebijakan Pengadaan Garam Beryodium di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati*. Tesis tidak Diterbitkan. Semarang. Program

Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Melalui:
<http://eprints.undip.ac.id/16958/1/DEVITA_AYU_MIRANDATI.pdf> (21/7/13).

Sugiana, Puji Meilita. 2012. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan*. Tesis tidak Diterbitkan. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Administrasi Kebijakan Publik Jakarta. Melalui:
<<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=jurnal%20tesis%20implementasi%20kebijakan%20publik&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Ffontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20317298T31556Implementasi%2520kebijakan.pdf&ei=2WPrUfbYMszyrQfC0oDQBA&usg=AFQjCNGW80AK5R9mJXcWczOgpE1myeh68g&bvm=bv.49478099.d.bmk>> (21/7/13).

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publishing.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Keputusan Walikota Palu nomor 460/607/SosNaker/2012 tentang penetapan pengurus forum warga dalam penanganan kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu Tahun 2012.